BAB I
NETRALITAS SWISS

1.1 Sejarah Perkembangan Netralitas Swiss

Swiss merupakan salah satu negara yang terletak di wilayah benua Eropa, berbatasan dengan Prancis di sebelah barat, Italia di sebelah tenggara, Austria dan kerajaan Liechtenstein di sebelah Timur, serta Jerman di sebelah utara. Swiss merupakan *landlocked country*—negara tanpa akses langsung ke laut lepas. Dikelilingi oleh Pegunungan Alpen yang menutupi dua per tiga dari wilayah negaranya, sekitar 23% permukaan daratan Swiss berada pada ketinggian lebih dari 2000 mdpl (Swiss Federal Authorities, 2023). Lebih dari separuh wilayah Swiss merupakan pegunungan—Alpen, Central Plateau, dan Jura—namun hanya seperempat dari total penduduk yang tinggal di wilayah itu (Swiss Federal Authorities, 2023).

Selama berabad-abad, Swiss berkembang dari jaringan aliansi kota menjadi negara federal (Federal Department of Foreign Affairs, 2024). Dikenal dengan nama resmi negara Konfederasi Swiss, ada total 26 kanton (negara bagian/wilayah administratif) yang menjadi bagian dari negara ini (Federal Department of Foreign Affairs, 2024). Sebagai salah saru negara Eropa Barat, perkembangan Swiss mirip dengan negara-negara disekitarnya. Meskipun demikian, Swiss mampu mempertahankan karakteristiknya yang unik. Seperti di mayoritas wilayah Eropa, reformasi dan perpecahan Kekristenan Barat juga menyebabkan ketegangan dan konflik bersenjata di Swiss. Meskipun demikian, kanton-kanton yang tergabung dalam konfederasi berhasil terhindar dari konflik terbesar Eropa, yaitu Perang Tiga Puluh Tahun (1618-1648). Keberhasilan ini menjadi dasar perkembangan prinsip netralitas Swiss (Federal Department of Foreign Affairs, 2024). Seiring berjalannya waktu, Swiss mengembangkan karakteristik yang mampu bertahan hingga kini, yaitu netralitas.

Swiss diakui sebagai negara yang merdeka pada perjanjian Westphalia 1648. Dengan berakhirnya konflik keagamaan di Eropa ini, Swiss mulai diakui sebagai negara yang berdaulat dan independen, dan bukan sekadar bagian dari Kekaisaran Romawi Suci. Hal ini terjadi karena Johann Rudolf Wettstein mengajukan permintaan agar wilayah kota Basel dan Schaffhausen dibebaskan dari yurisdiksi pengadilan Kekaisaran. Permintaan ini muncul karena Basel dan Schaffhausen sering digugat oleh pedagang asing di *Imperial Chamber Court* (pengadilan Kekaisaran Romawi Suci) (Federal Department of Foreign Affairs, 2025a). Hasilnya, seluruh Konfederasi Swiss mendapat pengecualian dari pengadilan Kekaisaran. Secara hukum, ini hanya dianggap sebagai "hak istimewa" dalam sistem Kekaisaran. Dari sinilah muncul interpretasi bahwa pengecualian ini merupakan bentuk kedaulatan penuh Swiss dibawah hukum internasional.

Setelah ketegangan keagamaan mereda, aktivitas ekonomi di Swiss mulai mengalami perkembangan, yaitu perkembangan dalam industri pertanian dan munculnya industri rumahan terutama di bidang tekstil dan pembuatan jam. Mereka tidak hanya berfokus pada masalah ekonomi, tetapi juga pada pengembangan diri pribadi dan budaya serta patriotisme baru yang tidak lagi bersifat kanton, tetapi nasional. Dalam prosesnya, mereka mengatasi batas-batas keagamaan dan secara aktif bertukar ide dengan para pemikir yang berpikiran sama di luar negeri (Federal Department of Foreign Affairs, 2024). Produk dari industri rumah tangga merupakan barang mewah yang dieskpor ke luar negeri. Oleh karena itu, bank perdagangan internasional muncul dari kebutuhan perdagangan jarah jauh, terutama di Jenewa, Besel, dan Zurich sebagai pusat produksinya (Federal Department of Foreign Affairs, 2024).

Di tahun-tahun berikutnya, Swiss terus mengalami konflik internal dan eksternal seperti Perang Petani Swiss 1653, Perang Villmergen 1656 dan 1712, Revolusi Prancis dan perang Napoleon yang menghancurkan Konfederasi Swiss Lama dengan otonomi kantonnya dan mengubahnya menjadi Republik Helvatia yang memiliki administrasi dan kekuasaan terpusat. Struktur politik yang berbeda

antara Republik Helvatia dan konfederasi Swiss ini memicu ketidakstabilan politik internal, yang pada akhirnya menyebabkan Napoleon Bonaparte mengeluarkan Act of Mediation pada 1803 yang mengembalikan sebagian otonomi kanton meskipun masih dalam naungan Prancis (Federal Department of Foreign Affairs, 2025c). Pengalaman ini membuat Swiss menyadari kerentanannnya terhadap konflik kekuatan besar dan mendorong keinginan stabilitas eksternal.

Pada Kongres Wina tahun 1814 dan Perjanjian Paris tahun 1815 setelah kekalahan Napoleon, kekuatan besar Eropa mendefinisikan ulang Eropa, dan dalam melakukannya mereka dipandu oleh gagasan restorasi. Mereka menjamin netralitas permanen Swiss dan memastikan bahwa kelengkapan serta keutuhan wilayah Swiss yang diperluas akan dipertahankan (Federal Department of Foreign Affairs, 2025b).

Swiss tidak menyatakan netralitasnya pada tahun 1815. Meskipun demikian, saat ini netralitas merupakan sebuah identitas dan bentuk kedaulatan bagi Swiss. Oliver Meuwly, seorang sejarawan Swiss mengatakan bahwa pada saat itu netralitas bukanlah prinsip yang penting dan hanya merupakan konsekuensi dari Swiss yang baru saja merdeka dan dikenal di panggung internasional (Pauchard, 2015). Netralitas memberikan manfaat bagi Swiss untuk tidak memihak pihak manapun. Selama Perang Prancis-Prusia tahun 1870, seperti selama Perang Dunia Pertama, Swiss menyatakan dirinya netral (Pauchard, 2015). Gagasan netralitas ini sangat berguna; tidak hanya digunakan untuk menarik diri, tetapi sebagai sarana untuk selalu siap sedia (Pauchard, 2015).

Abad ke-20 secara jelas menunjukkan betapa kuatnya keterkaitan Swiss dengan negara-negara tetangganya di satu sisi dan bagaimana negara itu menempuh jalannya sendiri yang berbeda di sisi lain. Meskipun Swiss juga sangat terpengaruh oleh dua perang dunia, negara itu terhindar dari kehancuran. Selama Perang Dingin, Swiss berkembang dengan cara yang mirip dengan Eropa Barat, tetapi mampu mempertahankan netralitas dan peran mediasi antara Timur dan

Barat. Setelah berakhirnya Perang Dingin, Swiss terus berpartisipasi dalam penyatuan ekonomi Eropa, tetapi tetap menjaga jarak dari Uni Eropa.

1.2 Landasan Hukum Netralitas Swiss

Berdasarkan sejarah perkembangan netralitas Swiss, hukum yang menjadi dasar netralitas Swiss diantaranya adalah:

1. Kongres Wina 1815 sebagai pengakuan internasional atas netralitas permanen Swiss.
2. Konstitusi Federal Swiss 1848, dimana netralitas menjadi bagian dari kerangka konstitusional Swiss.
3. Konvensi Den Haag 1907, yaitu kodifikasi hak dan kewajiban negara netral dalam hukum internasional.
4. Ratifikasi Konvensi Den Haag 1907 dalam konstitusi Swiss pada 1910.
5. *Customary international law:* prinsip-prinsip hukum netralitas juga berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional.
6. *Neutrality policy*: ruang kebijakan yang memungkinkan Swiss menyesuaikan praktik netralitas dengan kondisi internasional.

Hukum netralitas ditegaskan dalam Konvensi Den Haag 1907 tentang hak dan kewajiban negara serta individu netral dalam keadaan perang di darat maupun di laut, yang kemudian diratifikasi oleh Swiss pada tahun 1910. Konvensi ini merupakan satu-satunya perjanjian internasional yang secara khusus mengatur hukum netralitas. Namun, ketentuan tersebut telah berkembang melalui hukum kebiasaan internasional: saat ini aturan yang sama berlaku tidak hanya untuk perang darat dan laut, tetapi juga untuk perang udara. Konvensi Den Haag 1907 dan hukum kebiasaan internasional berlaku langsung di Swiss.

Berdasarkan Konvensi Den Haag 1907, negara netral memiliki kewajiban sebagai berikut (Federal Department of Foreign Affairs, 2022b)

1. Hukum netralitas mewajibkan negara netral untuk tidak ikut serta dalam konflik bersenjata internasional. Demikian pula, negara netral tidak boleh memberikan dukungan militer kepada pihak yang berperang, baik berupa pasukan, persenjataan, maupun dengan menyediakan wilayahnya.
2. Negara netral harus memastikan *inviolability* (kekebalan) atas wilayahnya sendiri, tetapi hanya dalam batas wajar. Artinya negara netral tidak bisa dan tidak boleh mempersiapkan diri menghadapi setiap serangan. Untuk menjamin *inviolability* wilayahnya, negara netral dapat bekerja sama dengan negara lain, misalnya dalam pengadaan persenjataan atau pelatihan militer.
3. Dalam masa damai, menurut hukum netralitas, negara netral tidak boleh membuat komitmen yang akan menyebabkan pelanggaran terhadap netralitasnya jika terjadi perang. Sebagai contoh, negara netral tidak dapat bergabung dengan aliansi militer seperti NATO, yang mengharuskan bantuan timbal balik jika terjadi perang.

Konvensi Den Haag 1907 juga memberikan regulasi mengenai hak negara netral sebagai berikut (Federal Department of Foreign Affairs, 2022b).

1. Negara netral memiliki hak atas *inviolability* (tidak boleh dilanggar) wilayahnya. Pihak yang berperang dilarang mengangkut pasukan, amunisi, atau konvoi makanan melintasi wilayah negara netral, baik melalui darat, laut, maupun udara.
2. Negara netral juga memiliki hak untuk membela diri. Ia dapat menangkis serangan terhadap wilayahnya dengan menggunakan kekuatan militer.
3. Hukum netralitas tidak membatasi negara netral dalam hubungan diplomatik dan ekonomi, sehingga negara netral tetap memiliki hak untuk berdagang secara bebas, selama perdagangan tersebut tidak digunakan untuk tujuan militer.

1.3 Swiss dan Uni Eropa

Hingga saat ini, Swiss tidak tergabung dalam keanggotaan organisasi regional Uni Eropa (UE). Keputusan Swiss yang dengan teguh memilih untuk tidak tergabung dengan Uni Eropa didasarkan pada beberapa hal, diantaranya adalah identitas negara Swiss sebagai negara netral, sistem demokrasi langsung, dan dan kekhawatiran akan hilangnya kedaulatan nasional (Reskiyah, 2023). Pada awal 1990-an, Swiss sempat menandatangani perjanjian untuk bergabung dengan European Economic Area (EEA), namun pada akhirnya tidak bergabung karena hasil referendum 1992 menolak keanggotaan tersebut, sehingga Swiss memilih jalur bilateral (Czermińska, 2023).

Sebagai alternatif keanggotaan, Swiss dan UE menandatangani serangkaian perjanjian bilateral yang dikenal sebagai Bilateral I (ditandatangani 1999, berlaku 2002) dan Bilateral II (ditandatangani 2004). Bilateral I mencakup isu-isu utama seperti pergerakan bebas orang, penghapusan hambatan teknis perdagangan, akses ke pasar publik, pertanian, transportasi darat dan udara, serta partisipasi Swiss dalam program penelitian UE. Bilateral II memperluas cakupan kerja sama ke bidang perpajakan tabungan, penanganan penipuan, lingkungan hidup, pendidikan, dan keikutsertaan Swiss dalam Schengen dan Dublin Agreement (Czermińska, 2023). Data dari Fedlex (2022) menyebutkan bahwa total terdapat 20 perjanjian bilateral sektoral dan sekitar 120 perjanjian pendamping yang mengatur hubungan Swiss-UE, mencakup hampir seluruh aspek ekonomi, hukum, dan sosial. Perjanjian ini bersifat sektoral dan saling terkait, sehingga jika salah satu perjanjian utama dibatalkan, perjanjian lain juga dapat ikut jatuh (guillotine clause) (Czermińska, 2023).

Jaringan perjanjian bilateral ini menciptakan interdependensi yang sangat dalam antara Swiss dan UE. Dari sisi ekonomi, UE adalah mitra dagang terbesar Swiss, menyerap sekitar 42,62% dari keseluruhan produk yang diekspor oleh Swiss. Jika dibandingkan dengan Rusia, kurang dari 1% produk ekspor Swiss yang diekspor ke sana. Begitu pula dengan nilai impor. Menurut data dari *World Integrated Trade Solution* (WITS) tahun 2020, negara asal atas produk impor

didominasi oleh negara yang tergabung dalam Uni Eropa yang menduduki peringkat sepuluh besar, diikuti oleh Amerika dan Inggris yang masih merupakan bagian dari blok barat (Dan A. Cohen, 2022). Hal ini menunjukkan interdependensi ekonomi antara Uni Eropa dengan Swiss, dan ketimpangannya jika dibandingkan dengan interdependensi Swiss dengan Rusia.